

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Penafsiran para ahli administrasi publik terkait dengan definisi kebijakan publik, secara umum memberikan penafsiran yang berbeda-beda akan tetapi ada juga yang memiliki kesamaan persepsi atas definisi kebijakan publik tersebut. Definisi kebijakan publik yang paling populer atau dikenal masyarakat adalah pendapat dari Dye (dalam Agustino, 2012:7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Menurut Dye, jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus memiliki tujuan dan kebijaksanaan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijaksanaan negara, karena dampaknya sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap publik.

Berbeda dengan pendapat Friedrich (dalam Agustino, 2012:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan dimaksud.

Lain halnya dengan Anderson (dalam Agustino, 2012:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan Anderson ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Selain itu, konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara alternatif yang ada.

Berbagai definisi di atas, menurut persepsi Dye mengacu pada apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah kebijaksanaan. Definisi ini tidak menitikberatkan pada proses akan tetapi pada keputusan yang diambil oleh pemerintah. Berbeda dengan definisi di atas menurut Friedrich, mengacu pada bagaimana kebijakan tersebut dapat berguna dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau orientasinya, sedangkan definisi Anderson mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan dari apa yang seharusnya dimaksud dan diusulkan. Definisi ini lebih menekankan pada tindakan pelaksana kebijakan dari pada pendapat-pendapat atau asumsi-asumsi pelaksana.

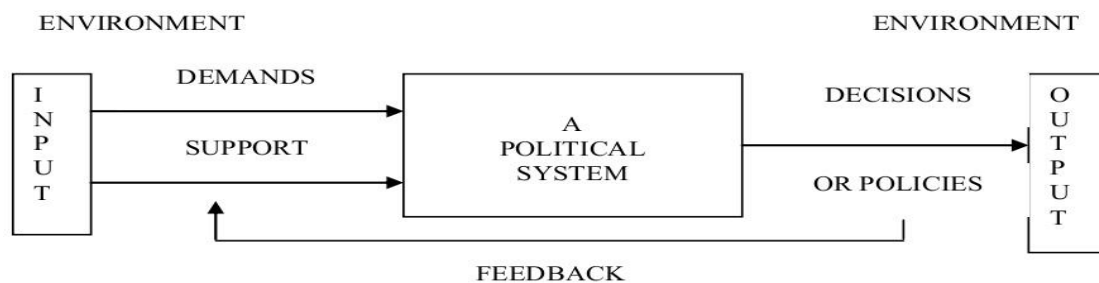
Peneliti dapat menarik kesimpulan dari berbagai paparan definisi di atas, bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu masalah publik, yang memiliki maksud atau tujuan yang jelas, sehingga dapat berguna untuk mengatasi masalah tersebut dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Dilihat dari proses kebijakan, Nugroho menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh Easton. Easton dalam Nugroho (2008: 383) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi.

“Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri dari input, throughput, dan output, seperti digambarkan sebagai berikut”

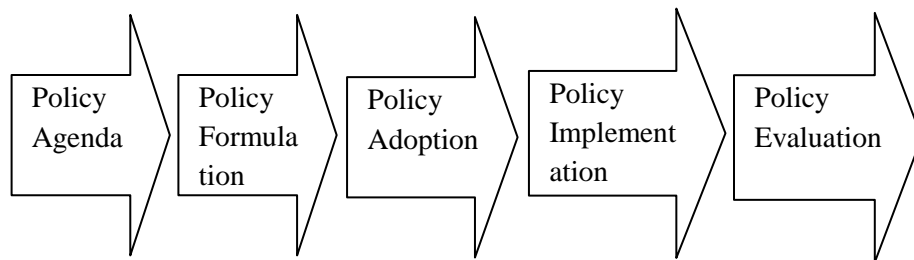
Bagan 2.1 Proses Kebijakan Publik



Sumber: Easton (dalam Nugroho 2008: 383)

Model proses kebijakan publik dari Easton mengasumsikan proses kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Model Easton ini tergolong dalam model yang sederhana, sehingga model Easton ini dikembangkan oleh para akademisi lain seperti Anderson dan Dye. Menurut Anderson, dkk (dalam Nugroho 2008:186) proses kebijakan melalui tahap-tahap/stages sebagai berikut:

bagan 2.2. Proses Kebijakan Publik



Sumber: Anderson (dalam Nugroho, 2008: 186)

Dijelaskan bahwa tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

Tahap 1: *Policy agenda* (penyusunan agenda) yaitu masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi dan dimasukkan ke dalam agenda untuk dipilih.

Tahap 2: *Policy formulation* (formulasi kebijakan) yaitu dari berbagai masalah yang ada tersebut ditentukan masalah mana yang merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan.

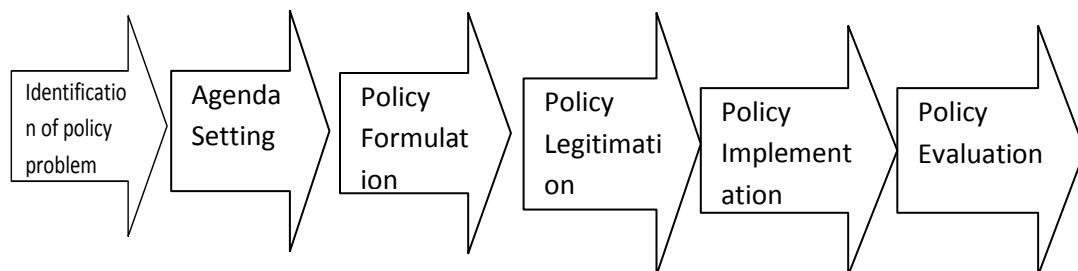
Tahap 3: *Policy adoption* (adopsi kebijakan) yaitu akan diadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Tahap 4: *Policy implementation* (implementasi kebijakan) yaitu alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan.

Tahap 5: *Policy evaluation* (evaluasi kebijakan) yaitu kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi, untuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah atau tidak.

Pakar lain Dye mengemukakan tahap proses kebijakan yang hampir mirip dengan model Anderson, dkk tersebut. Menurut Dye (dalam Nugroho, 2008:189) proses kebijakan publik adalah sebagai berikut :

Bagan 2.2 Proses Kebijakan Publik



Sumber: Dye (dalam Nugroho, 2008: 189)

Proses kebijakan model Dye mendapatkan satu tambahan tahap sebelum agenda *setting*, yaitu identifikasi masalah kebijakan. Dye melihat tahapan pra penentuan agenda (*agenda setting*) yang terlewatkan oleh Anderson. Selain itu Dye juga menggantikan tahap *policy adoption* dengan *policy legitimation*. Pergantian ini tidak

memiliki perbedaan mendasar karena baik Anderson dan Dye sama-sama menekankan pada proses legitimasi dari kebijakan itu menjadi suatu keputusan pemerintah yang sah.

Paparan tentang tahap-tahap kebijakan di atas telah menjelaskan bahwa tahap-tahap kebijakan tersebut merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan semuanya merupakan bagian integral yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap awal dimana dalam tahap tersebut dilakukan identifikasi persoalan (masalah) politik publik yang layak untuk dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu tahap formulasi kebijakan, setelah diformulasikan, pada tahap adopsi kebijakan akan dipilih alternatif terbaik yang akan dijadikan solusi sebagai pemecahan masalah publik. Selanjutnya kebijakan yang telah diputuskan dan disahkan akan diimplementasikan untuk meraih tujuan awal yang telah ditentukan. Akhir adalah evaluasi (penilaian) kebijakan, akan menilai ketepatan, manfaat dan efektivitas hasil kebijakan yang telah dicapai melalui implementasi dan kemudian dibandingkan dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Dalam tahap-tahap kebijakan tersebut, penelitian ini berada pada tahap implementasi kebijakan. Peneliti ingin melihat proses pelaksanaan relokasi sementara pedagang Pasar Smp Kota Bandar Lampung.

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2012:674) namun dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya berbagai intervensi. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi (Nugroho, 2012:681). Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, munculnya di lapangan. Bardach (dalam Agustino, 2012:138) menggambarkan kerumitan proses implementasi yaitu:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.

Van Horn dan Van Meter (dalam Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah serta swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan-tindakan tersebut berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut. Definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan mengandung tiga hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

Menurut Bardach (dalam Agustino, 2012:138) implementasi kebijakan jauh lebih sulit dibandingkan pada saat formulasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier lebih fokus pada apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut secara tegas, agar proses pelaksanaannya tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan. Van Horn dan Van Meter tidak jauh berbeda dengan Mazmanian, selain proses dan pencapaian tujuan juga melihat kelangsungan dari kebijakan tersebut agar dapat ditransformasikan menjadi pola-pola operasional, intinya bahwa implementasi kebijakan tersebut berkelanjutan.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari berbagai paparan definisi di atas, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang

ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Mirrile Grindle (dalam Agustino, 2012:139) sebagai berikut :

“pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksana program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan (Agustino, 2012: 139) yakni: pendekatan *top down* dan *bottom up*. Istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan pendekatan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Pendekatan *top down*, misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari di antara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan

pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Pada pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin oleh karena *street level-level-bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan. Berangkat dari persepektif tersebut, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan (Agustino, 2012: 141) sebagai berikut:

1. Sampai sejauhmana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengan keputusan kebijakan tersebut.
2. Sejauhmana tujuan kebijakan tercapai.
3. Faktor-faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi output dan dampak kebijakan.
4. Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman lapangan.

Empat pertanyaan tersebut mengarah pada inti sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat

kebijakan di level pusat. Fokus tersebut membawa konsekuensi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya perubahan melalui sistem baru. Sistem dibuat untuk memperbaiki atau meningkatkan pemrosesan informasi. Sistem diperkenalkan dan diterapkan ke dalam organisasi pengguna. Sistem yang diterapkan itu digunakan oleh anggotanya maka pelaksanaan sistem dapat dikatakan berhasil, sedangkan jika para penggunanya menolak sistem yang diterapkan, maka pelaksanaan sistem tersebut dapat digolongkan gagal.

Model manajemen implementasi menurut Nugroho (2012:537) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi di dalam :

“Konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut”.

Implementasi kebijakan yaitu mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, penggerakan, dan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

C. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan, sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan, oleh karena itu penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Banyak model implementasi kebijakan, pada umumnya model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan.

Beberapa model implementasi kebijakan meliputi: model Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2012:144) adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Model ini memiliki tiga variabel, antara lain:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi secara tepat, meliputi: kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana, aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang, dan akses formal piha-pihak luar;
3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, meliputi: kondisi sosial, ekonomi dan tekhnologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, dan kesepakatan serta kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Selain itu, model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* dikembangkan oleh Edward (dalam Agustino, 2012:149). Edward menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Winarno, 2012:177), yaitu:

1. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

2. Sumber daya

Sumber-sumber yang penting meliputi: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas;

3. Disposisi meliputi: pengangkatan birokrat, insentif; dan
4. Struktur birokrasi.

Model Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:141) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: adanya tujuan dan sasaran, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn mengandaikan implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Implementasi ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan pelaksanaan, antara lain:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumberdaya
- 3) Karakteristik agen pelaksana
- 4) Sikap /kecenderungan para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Model yang terakhir adalah model implementasi kebijakan Grindle yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Peneliti memilih model Grindle berdasarkan sub variabel yang terdapat dalam model pendekatan ini yang mampu menjawab

permasalahan yang terjadi dalam implementasi relokasi sementara pedagang Pasar Smp Kota Bandar Lampung. Pendekatan Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process* (dalam Agustino, 2012:154) menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 1. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context of Policy* (lingkungan kebijakan).

1. *Content of Policy* (isi kebijakan) menurut Grindle adalah:

a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Tipe manfaat berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Program Implementer (pelaksana program)

Menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Context of Policy (lingkungan implementasi) menurut Grindle adalah:

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Karakteristik dari rezim yang berkuasa akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan

kepentingan rakyat, maka kesejahteraan rakyat akan dengan mudah terwujud, karena rezim yang seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat, namun yang terjadi akan sebaliknya apabila rezim lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi. Dalam keadaan ini rakyat akan dipojokkan dan tidak menjadi prioritas utama, sehingga rakyat menjadi korban dari rezim kepemimpinan yang berkuasa.

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.